



POLITEKNIK POS INDONESIA
JURNAL AKUNTANSI

TH XII / 02 / Oktober / 2019

ISSN 1979 - 8334

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya)

Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500

Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin

Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung)

Christine Riani Elisabeth, Nurhayati

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Riani Tanjung, Nindhy Putri Pratama

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018

Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal

Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ

Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi

Ade Pipit Fatmavati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi

Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016

Jaka Maulana, Deden Egiani

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016

Marismiati, Dwi Putra Mahardika

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (Warehouse) PT Bio Farma (Persero)

Muhammad Rizal Satria, Najamudin Perbowo

Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth

Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018

Tia Setiani, Rika Nurul Madila



Jurnal Akuntansi	Tahun XII	Nomor 02	Bandung, Oktober 2019	ISSN 1979-8334
------------------	-----------	----------	-----------------------	----------------

JURNAL AKUNTANSI

TH XII / 02 / Oktober / 2019

ISSN : 1979-8334

Setiap tahun terbit dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Berisi hasil penelitian dan kajian analisis di bidang Akuntansi.

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI :

Pelindung

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

Penanggung Jawab

Y. Casmadi.,SE., MM.

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak.

Anggota

Surya Ramadhan Noor, SE, M.M

Toto Suwarsa, SE,Ak,M.M

Indra Firmansyah, SE, Ak, MM

Dewi Selviani Y, SS. M.Pd.

Rukmi Juwita, SE., M.Si., Ak., CA.

Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.

Ade Pipit Fatmawati, SE, M.Pd

M. Rizal Satria, SE, M.Ak, Ak

Marismiati, SE, M.Si

Jaka Maulana, SE. M.Ak, CA, CPSAK

Diana Maryana, SE, M.Si

Riani Tanjung, SE, M.Si, Ak. CA

Christine Riani Elisabeth, SE, M.M

Tia Setiana , S.Pd M.M

ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI :

Jurusan Akuntansi, Gedung Pendidikan,

Politeknik Pos Indonesia

Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-20009568,

E-mail : poltekpos@jurusanakuntansi.com

Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No. 006/BAN-PT/Ak.V/Dpl-III/VI/2005

KATA PENGANTAR

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 6 (enam) topik, meliputi :

Akuntansi Keuangan
Akuntansi Biaya
Perpajakan
Auditing
Manajemen Keuangan
Sistem Akuntansi

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Amin

Bandung, Oktober 2019

Redaksi

JURNAL AKUNTANSI
ISSN: 19798334
TH XII / 02 / Oktober / 2019

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya) <i>Diana Maryana, Fitri Lestari Sagala</i>	1
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Kas Terhadap Kualitas Laporan Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero) Kp Kuningan 45500 <i>Surya Ramadhan Noor, Muhammad Deri Kamaludin</i>	11
Analisis Biaya Transportasi Dalam Distribusi Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Pos Logistik Indonesia BO Bandung) <i>Christine Riani Elisabeth, Nurhayati</i>	21
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara <i>Riani Tanjung, Nindhya Putri Pratama</i>	29
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2018 <i>Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal</i>	40
Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT XYZ <i>Khairaningrum Mulyanti, Molyany Gafynia Dongoran</i>	51
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi <i>Ade Pipit Fatmawati, Oktaviani Cynthia Dewi Pratiwi</i>	60
Pengaruh Total Assets Turnover Terhadap Return On Equity Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Periode 2010-2016 <i>Jaka Maulana, Deden Egiani</i>	68
Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bank Bjb Syariah 2012-2016 <i>Marismiati, Dwi Putra Mahardika</i>	78

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan Barang Pada Bagian Manajemen Persediaan (<i>Warehouse</i>) PT Bio Farma (Persero)	87
<i>Muhammad Rizal Satria, Najamudin Prabowo</i>	
Analisis Pengujian Pengendalian Aset Tetap Untuk Mencegah Kehilangan Aset Tetap Di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia	94
<i>Nur Aziz Sugiharto, Christine Riani Elisabeth</i>	
Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018	103
<i>Tia Setiani, Rika Nurul Madila</i>	

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016-2018

Oleh : Toto Suwarsa, Thayeb Ihsa Sawal

Email : totosuwarsa@poltekpos.ac.id, thayebihsa26@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan merupakan indikator penilaian pencapaian suatu tujuan sebuah instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan, pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dan pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dokumentasi. Hasil uji hipotesis pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,902 > 1,6909$). Artinya PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Sedangkan hasil hipotesis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-3,583 < 1,6909$). Artinya Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah adalah $F_{hitung} 16,733 > F_{tabel} 3,28$). Artinya secara simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Kesimpulannya yaitu secara parsial dan simultan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang Undang- Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut desentralisasi. Desentralisasi adalah pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah, dimaksudkan agar daerah dapat langsung merasakan program dan pelayanan yang dirancang oleh pusat di daerah masing-masing (Sujarweni, 2015:233). Selaras dengan tujuan otonomi dan *outcome*, penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah yaitu menuntun kemandirian suatu daerah sehingga upaya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sumber dana bagi daerah dalam rangka membiayai aktifitas operasional pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, dan sumber dana daerah melalui dana perimbangan yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan transfer. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Sedangkan tingkat kemandirian keuangan

daerah itu sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Namun, dalam kenyataannya, pajak daerah ini belum terlalu kuat untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah daerah dan secara umum, belum ada kabupaten/kota di Indonesia yang mampu menggali, mengoptimalkan dan menjadikan penerimaan dari pajak daerah sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi semua pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan pemerintah pusat dan provinsi berupa Dana Perimbangan untuk menutupi semua alokasi belanja daerah. Ini berarti daerah otonomi belum sepenuhnya. dikatakan berhasil dalam melakukan otonomi daerah. Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan ketergantungan daerahnya terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, hal tersebut dapat membuat kinerja keuangan menurun. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2017:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Bastian, 2013:232). Konsep pengelolaan Kinerja Keuangan organisasi sector public yang mendasar pada elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2017:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan public yang lebih baik dan berkualitas. Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang menunjukkan adanya permasalahan dalam keuangan daerahnya yaitu Kinerja Keuangan yang dianggap kurang efisien. Fenomena tersebut dapat terlihat dengan menilai efisiensi atas realisasi belanja dari alokasi penganggaran yang dilakukan Pemerintah Kota

Bandung terhadap suatu anggaran

tahun 2017-2018.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), “Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *positive*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan”.

Di dalam penelitian ini juga digunakan perumusan masalah asosiatif, yang mana menurut Sugiyono (2017:38), “Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel”. Populasi dalam penelitian ini berupa anggaran Pemerintah Kota Bandung. Anggaran tersebut berupa laporan realisasi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Bandung Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yakni *purposive sampling*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Periode penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

(2) Jenis data yang digunakan adalah data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan per bulan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. (3) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel. Adapun analisis yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Berganda, Analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t, Uji f

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Tabel 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Bulan	Pendapatan Asli Daerah		
	2016	2017	2018
1	118,150,405,389.00	128,865,349,265.00	168,885,741,536.00
2	129,252,148,707.00	129,168,094,447.00	173,357,683,660.00
3	149,982,559,650.00	141,771,547,601.00	165,637,413,871.00
4	172,148,313,398.00	183,595,846,857.00	183,164,226,393.00
5	147,270,027,444.00	200,379,443,934.00	186,153,368,595.00
6	164,536,648,642.00	194,007,650,844.00	151,699,477,360.00
7	117,353,095,744.00	183,689,145,468.00	252,702,583,622.00
8	243,601,235,405.00	280,029,485,464.00	454,460,394,413.00
9	328,362,408,310.00	367,496,766,698.00	230,261,905,089.00
10	191,108,045,452.00	224,729,668,517.00	192,299,191,085.00
11	171,960,864,437.00	221,714,461,570.00	190,182,932,638.00
12	219,029,952,384.00	323,009,960,220.00	222,786,867,937.00
Total	2,152,755,704,962.00	2,578,457,420,885.00	2,571,591,786,199.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung dengan nilai tertinggi terdapat pada bulan Agustus tahun 2018 sebesar Rp 454.460.394.413,

sedangkan realisasi terendahnya terdapat pada bulan Juni tahun 2016 yaitu sebesar Rp 117.353.095.744. Maka dari itu dapat diprediksi Kinerja Keuangan pada bulan Agustus tahun 2018 diperkirakan baik.

Tabel 2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Bulan	Dana Perimbangan		
	2016	2017	2018
1	260,233,426,000.00	278,742,754,000.00	260,233,426,000.00
2	6,981,545,544.00	175,152,859,871.00	173,910,085,200.00
3	499,227,410,200.00	322,059,776,770.00	355,282,003,670.00
4	160,085,653,700.00	158,012,944,500.00	139,164,680,300.00
5	233,200,837,903.00	168,895,027,000.00	214,525,535,600.00
6	147,601,541,111.00	230,927,559,274.00	227,897,220,800.00
7	320,614,894,100.00	209,920,251,000.00	154,490,729,250.00
8	65,572,123,489.00	141,070,354,500.00	143,137,757,800.00
9	146,577,346,139.00	207,319,526,400.00	301,597,410,200.00
10	139,371,377,000.00	212,196,547,569.00	154,341,742,082.00
11	225,007,907,256.00	167,752,079,455.00	270,084,015,865.00
12	160,921,116,869.00	18,702,958,256.00	32,573,209,066.00
TOTAL	2,365,395,179,311.00	2,290,752,638,595.00	2,427,237,815,833.00

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan yang terealisasi selalu mengalami kenaikan setiap bulannya, dengan nilai tertinggi terdapat pada bulan Maret tahun 2016 sebesar Rp

499.227.410.200, sedangkan realisasi terendahnya terdapat Februari tahun 2016 yaitu sebesar Rp6.981.545.544. maka dari itu dapat diprediksi bahwa Kinerja Keuangan pada bulan maret tahun 2016 dapat dikatakan buruk.

1. Hasil Analisis

a. Korelasi Berganda

Tabel 3

Hasil Analisis Korelasi Berganda

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.710 ^a	.504	.473	11.63361	.504	16.733	2	33	.000

a. Predictors: (Constant), Dana Peimbangan, PAD

Sumber: IBM SPSS Statistic 23.0

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa analisis berganda diatas menunjukkan sig. f change pada angka $0,000 < 0,05$ maka

menunjukkan berkorelasi kuat yang ditunjukkan pada R pada angka 0,710. Nilai R 0,61 - 0,80 korelasi kuat.

b. Korelasi Sederhana

Tabel 4
Hasil Analisis Korelasi Sederhana

		Correlations		
		PAD	Dana Peimbangan	Kinerja Keuangan
PAD	Pearson Correlation	1	-.368 [*]	.557 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.027	.000
	N	36	36	36
Dana Peimbangan	Pearson Correlation	-.368 [*]	1	-.614 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.027		.000
	N	36	36	36
Kinerja Keuangan	Pearson Correlation	.557 ^{**}	-.614 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa besarnya hubungan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0,557. Angka korelasi ini menunjukkan bahwa korelasi

antara pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan berada dalam kategori “Sedang” yang dapat dilihat pada ukuran dengan nilai antara 0,41-0,60.

c. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	42.329	8.731		4.848	.000
	PAD	.084	.029	.383	2.902	.007
	Dana Peimbangan	-.079	.022	-.473	-3.583	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari nilai-nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang dapat disusun untuk variabel Lingkungan Pengendalian dan Penilaian resiko adalah:

$$Y = 42,329 + 0,084X_1 - 0,079X_2$$

Dimana :

Dari persamaan diatas, dapat diartikan sebagai berikut: (1) Jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Perimbangan (X_2) nilainya adalah 0, maka nilai variabel Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar konstanta atau sebesar 42,329. (2) Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,084. artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1, maka alokasi belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,084. Karena koefisien bernilai positif maka terjadi hubungan positif pula antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap

Y = Kinerja Keuangan a = Konstanta

b_1 dan b_2 = Koefisien Regresi X_1 = PAD

X_2 = Dana Perimbangan

Kinerja Keuangan (Y). Jadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) mengakibatkan kenaikan pada Kinerja Keuangan (Y). (3) Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar -0,079, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Dana Perimbangan mengalami kenaikan 1, maka alokasi belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar -0,079. Karena koefisien bernilai negatif maka terjadi hubungan negatif pula antara Dana Perimbangan (X_2) terhadap Kinerja Keuangan (Y), jadi kenaikan Dana Perimbangan (X_2) mengakibatkan penurunan pada Kinerja Keuangan (Y).

a. Koefisien Determinasi

Tabel 6

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 ^a	.504	.473	11.63361

a. Predictors: (Constant), Dana Peimbangan, PAD

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,504. Nilai ini dikenal dengan dengan koefisien determinasi (Kd) yang dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,710)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,504 \times 100\% = 50,4$$

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan sebesar 50,4% dan s

isanya 49,6 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh

penulis. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki kontribusi positif yang sedang terhadap Kinerja Keuangan sebesar 50,4%.

b. Hasil Uji t

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.329	8.731		4.848	.000
	PAD	.084	.029	.383	2.902	.007
	Dana Peimbangan	-.079	.022	-.473	-3.583	.001

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Hasil uji t dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 23.0 dalam tabel diatas antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang dapat dilihat dari kolom t dalam tabel *coefficient*

menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,902. Dengan melihat pada t_{tabel} jumlah data $n = 36$ dan $(df) = n-k-1$ atau $36-3 = 33$ pada tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ dengan pengujian dua pihak maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,692. Hal ini menunjukkan bahwa hasil

pengolahan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,007 < 0,05, maka dapat diartikan H_0

dalam penelitian ini ditolak dan H_a diterima. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan.

c. Hasil Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4529.220	2	2264.610	16.733	.000 ^b
	Residual	4466.246	33	135.341		
	Total	8995.466	35			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Dana Peimbangan, PAD

Dari hasil derajat kebebasan (df) dapat dilihat dalam F_{hitung} sebesar 16,733, sehingga dapat ditentukan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($16,733 > 3,28$)

1. Hasil uji hipotesis secara parsial antara variabel X_2 dan Y menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Dana Perimbangan terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

2. Hasil uji hipotesis secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press

Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Halim dan Syam Kusufi. 2013 . *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga,

Yogyakarta: UPP
STIM YKPN

Mahsun, Mohamad. 2012 .

Pengukuran Kinerja
Sektor Publik.
Yogyakarta: BDFE-
Yogyakarta

Mardiasmo. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
Edisi Revisi. Yogyakarta:
ANDI

Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik.*
Yogyakarta: ANDI

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah.

Permendagri No. 21 Tahun
2011 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah

- Samudra, Azhari Aziz. 2015.
Perpajakan Di Indonesia.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods).*
Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017.
Statistika Untuk Penelitian.
Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015.
Akuntansi Sektor Publik.
Yogyakarta:
- Pustaka baru Press
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah